

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Ali, Ahmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.
- Carlthorpe, Peter, 1993, *The Next American Metropolis-Ecology, Community and the American Dream*, Princeton Architectural Press, Canada.
- Ch. N. Latief., et al., 1997, *Sejarah Perkeretaapian Indonesia-Jilid I*, Cetakan Pertama, Angkasa, Bandung.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, 2018, *Penelitian hukum normatif empiris*, cetakan kedua, Prenadamedia Group, Depok.
- Harahap, M. Yahya, 2015. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-12, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jilid ke-2, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Herawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, NRLP, Jakarta
- Jened, Rahmi, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Cetakan Pertama, Kencana, Rawamangun, Jakarta.
- M.H, Fauzan, 2015, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Teguh, Muhammad Pangestu, 2019, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama, Sosial Politik Genius, Makassar,
- Telaga Bakti Nusantara, Tim., *Sejarah Perkeretaapian Indonesia-Jilid II*, Cetakan Pertama, Angkasa, Bandung.
- Peter, Marzuki Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga belas, Kencana, Jakarta.
- Purnomo, R Serfianto.D, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Tiga Puluh Tiga, Intermasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kedelapan, Pradnya Paramita, Jakarta.

Rawls, John, 1999, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi, the belknap press of Harvard University press, Cambridge.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soenandar, Taryana., *et al*, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yustisia, Tim, 2017, *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/ Kontrak*, Cetakan Pertama, Huta Publisher, Depok.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722 )

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5048)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82)

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (Berita Negara Nomor Republik Indonesia 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643)
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 )
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Calon/Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api Menjadi Calon/Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1730)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989)
- Perda Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2000-2010, (Lembaran Daerah Nomor 45)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 164)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470 /KMK. 01 /1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Peta Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-16/MBU/2008 tentang kerjasama dan pendayagunaan aktiva tetap milik BUMN, tanggal 15 Agustus 2008

### **3. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Nomor 11/PDT.G/2017/PN.Bdg perihal gugatan wanprestasi antara PT.Kereta Api Indonesia (Persero) melawan PT. Andyka

Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat Nomor 191/PDT/2018/PT.BDG perihal banding PT. Andyka antara PT.Kereta Api Indonesia (Persero) atas putusan nomor 11/PDT.G/2017/PN.Bdg

### **4. Artikel Jurnal**

AA, Gede DH. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.5, No.2, Agustus 2019

Komite Standar Akuntansi Pemerintah, *Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*, Buletin Teknis, Vol.04, 29 Desember 2006

Modul Sistem Akuntansi Pemerintah, *Barang Milik Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat*.

Rahmat , Saeful Pupu, “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*”, PGRI Vol.5, No.9., Madiun, 2009.

Warta BPK-RI, *Revaluasi Aset Jangan Meleset*, Vol. I, Edisi 11, Jakarta, November 2018.

### **5. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir**

Aditya, Mirza., 2017, “Penataan Pemanfaatan Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara – Studi Kasus Aset Tahan PT. Kereta Api Indonesia

(Persero)”, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## 6. Makalah

Nelson, Dick, dan Don Shakow., 1996, “Integrated Transportation Research”, *Paper at International Conference*, ‘Towards Sustainable Transportation Vancouver, Seattle, Washington, 22-24 Maret 1996.

## 7. Internet

Googlemap, ”Stasiun Depok Baru”, [https://www.google.com/maps/place/Stasiun+ Depok+Baru/](https://www.google.com/maps/place/Stasiun+Depok+Baru/), diakses 21 Januari 2020.

Idtesis.com., Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, [https://idtesis.com/ metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif), Diakses 24 Januari 2020.

Kereta Api, Stasiun Depok Baru, [https://heritage.kai.id/page/Stasiun% 20Depok%20Baru](https://heritage.kai.id/page/Stasiun%20Depok%20Baru), Diakses 30 Maret 2020.

Kereta Api Indonesia, “Sejarah Perkeretaapian”, [https://heritage.kai.id/ page/sejarah-perkeretapian](https://heritage.kai.id/page/sejarah-perkeretapian), diakses pada 12 Juni 2019

Wika Gedung.,Lini Bisnis, “Grand Zamzam-Depok”, [https://www.wikagedung.co.id/dev/our\\_business/detail/105/proyek\\_be rjalan\\_188.html](https://www.wikagedung.co.id/dev/our_business/detail/105/proyek_be rjalan_188.html), Diakses 28 Januari 2020